

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Satria ¹, Ilcham Dimas ², Sari ³, Kartika Rachma ⁴, Aryani ⁵, Yuli Antina ⁶

Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Negeri Sriwijaya

Correspondence		
Email: Ilchamdimas2002@gmail.com , Kartikasyahrul@yahoo.co.id , Yuli_aa@polsri.ac.id	No. Telp:	
Submitted 9 Agustus 2024	Accepted 15 Agustus 2024	Published 16 Agustus 2024

Abstract

This research was conducted with the aim of identifying the influence of human resource competence, utilization of information technology and the government's internal control system on performance accountability of government agencies in the Musi Rawas district. The population used in this study were 31 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Musi Rawas Regency consisting of 7 Agencies, 23 Offices and Secretariats by giving questionnaires to 186 respondents. This study uses multiple linear regression with SPSS version 26. The results of this study indicate that Human Resource Competence, Utilization of Information Technology and Government Internal Control Systems partially have a positive and significant effect on Performance Accountability of Musi Rawas Regency Government Agencies. Meanwhile, in terms of Human Resource Competence, Information Technology Utilization and the Government's Internal Control System have a positive and significant effect on the Performance Accountability of Musi Rawas Regency Government Agencies.

Keywords: Competency of Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal Control System, Agency Performance Accountability Government

PENDAHULUAN

Kewajiban lembaga melakukan AKIP tertuang dalam peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah, peraturan presiden tersebut melaporkan kalau AKIP merupakan perwujudan kewajiban sesuatu lembaga pemerintah buat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan serta sasaran yang sudah diresmikan lewat pertanggungjawaban secara periodik. Penerapan AKIP dikala ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP untuk Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan perwujudan keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran masing-masing tahunnya yang tercemin dari hasil pencapaian kinerja. Sistem Pengendalian ini ialah infrastruktur untuk manajemen buat membenarkan kalau visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bisa dipadati lewat implementasi strategi pencapaiannya (program serta aktivitas) yang sudah dilaksanakan.

Namun, berdasarkan hasil penilaian sampai tahun 2021 masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (berikutnya disingkat OPD) yang belum sukses mendapatkan kategori AA (Sangat Memuaskan) ataupun A (Memuaskan) untuk tingkatan AKIP tiap-tiap OPD, di Kabupaten Musi Rawas.

**Nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017-2021**



Tahun	Target	Realisasi
2017	B	B
2018	B	B
2019	B	B
2020	BB	B
2021	BB	B

Sumber: Data Musi Rawas

Bahwa nilai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sejak lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terus mendapatkan kategori B (baik). Capaian nilai B yang diraih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah dinilai baik. Walaupun begitu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih belum dapat mencapai target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2021 yaitu dengan kategori BB. pada tahun 2022-2023 ini akan meningkat menjadi kategori A (memuaskan). Untuk mencapai target tersebut, tentunya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus dapat meningkatkan faktor-faktor yang menjadi evaluasi guna menunjang pencapaian target nilai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi AKIP yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia. Di dalam AKIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dijelaskan bahwa optimalisasi pengembangan mutu sumber daya manusia menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan AKIP juga perlu didukung oleh sumber daya manusia dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan masing-masing serta sejalan dengan arah visi dan misi instansi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan instansi.

Berdasarkan penelitian Ramadhanis,& Ira Novianty (2020), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2020), Zulfiandri (2017), & Sukarno, dkk (2020), yang menyatakan bahwa kompetensi aparat sangat berpengaruh signifikan sehingga kompetensi aparat dapat meningkatkan implementasi system akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan Herianto.dkk (2021), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh. Septiyani (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh. Aprilianti(2020), Asmawanti S,dkk(2020), Fitriyani & Helmi Herawati(2019), Abdul Nasir. Arwan Gunawan(2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS KAJIAN TEORITIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebut bahwa: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ialah perwujudan kewajiban sesuatu instansi pemerintah buat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penerapan misi organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang sudah diresmikan lewat sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dituliskan bahwa “Aparatur penyelenggara pemerintahan daerah adalah kelembagaan, sistem dan prosedur dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintahan daerah” sehingga dengan kata lain, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disebut sebagai aparatur. Dalam peraturan ini juga dituliskan bahwa :



Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Pemerintah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa :

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Sistem pengendalian intern diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa :

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan bahwa semakin berkompennya sumber daya manusia yang ada maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan dan membantu tugas yang dilakukan seperti halnya penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat menjadi alat untuk antisipasi dan deteksi dini (built in control) terhadap ketidaksesuaian atau celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika internal control system yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control”.

Berdasarkan hal ini peneliti merumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu:

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kemampuan pemerintah mengungkapkan informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan anggaran yang digunakan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik

berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik yang dilakukan secara periodik.

. Berdasarkan Hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya maka, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu:

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Penelitian dilakukan di pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan objek Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 31 OPD di Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari seluruh Badan dan Dinas Kabupaten Musi Rawas. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel penelitian yaitu 29 sampel penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah AKIP. AKIP menggunakan instrumen kuesioner diukur dengan skala Likert 1-5 dimana 1 mengacu pada kondisi sangat tidak setuju terhadap pernyataan hingga 5 adalah sangat setuju.

Variabel Independen pada penelitian terdiri dari Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi menggunakan model regresi linier berganda dimana terdapat lebih dari 1 variabel independent yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis berdasarkan pada Uji F dan Uji T dimana pada pengujian ini melihat signifikansi nilai, apabila nilai signifikansi nilai lebih kecil dari 0.5 maka dapat dikatakan hipotesis diterima dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.5 maka hipotesis ditolak. Berikut model penelitian :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Nilai prediksi terhadap variabel kinerja

B1,b2 : Koefisien variabel bebas

X1 : Model penugasan

X2 : Iklim kepedulian

X3 : Informasi kinerja

e : Error

Tabel 1
Uji validatas Kuesioner Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
X1-1	,813	Valid
X1-2	,671	Valid
X1-3	,820	Valid
X1-4	,770	Valid
X1-5	,712	Valid



X1-6	,763	Valid
X1-7	,692	Valid
X1-8	,767	Valid
X1-9	,766	Valid
X1	1,000	Valid

Sumber: Output SPSS diolah (2023)

Hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap sembilan pernyataan yang digunakan dalam variabel kompetensi sumber daya manusia (X1). Variabel kompetensi sumber daya manusia bersifat signifikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
X2-1	,680	Valid
X2-2	,864	Valid
X2-3	,758	Valid
X2-4	,829	Valid
X2-5	,815	Valid
X2-6	,915	Valid
X2-7	,734	Valid
X2-8	,833	Valid
X2-9	,881	Valid
X2	1,000	Valid

Sumber: Output SPSS diolah (2023)

Hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap sembilan pernyataan yang digunakan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi (X₂). Mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi bersifat signifikan.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)

Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
X3-1	,835	Valid
X3-2	,794	Valid
X3-3	,674	Valid
X3-4	,827	Valid
X3-5	,823	Valid
X3-6	,867	Valid
X3-7	,892	Valid
X3-8	,811	Valid
X3-9	,628	Valid
X3-10	,751	Valid
X3-11	,802	Valid
X3-12	,730	Valid
X3-13	,705	Valid



X3-14	,746	Valid
X3-15	,861	Valid
X3	1,000	Valid

Sumber: Output SPSS diolah (2023)

Hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap lima belas pernyataan yang digunakan dalam variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X3). Mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pengendalian internal pemerintah bersifat signifikan.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
Y-1	,699	Valid
Y-2	,868	Valid
Y-3	,817	Valid
Y-4	,835	Valid
Y-5	,805	Valid
Y-6	,788	Valid
Y-7	,787	Valid
Y-8	,814	Valid
Y-9	,932	Valid
Y-10	,712	Valid
Y-11	,745	Valid
Y-12	,805	Valid
Y	1,000	Valid

Sumber: Output SPSS diolah (2023)

Dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap dua belas pernyataan yang digunakan dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersifat signifikan.

Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien *Alpha Cronbach* < 0,60.

Analisis statistik menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menentukan normalitas distribusi residual jika *Asymp.Sign.(2-tailed)* > α (0,05), maka data distribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04115310
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.210
	Positive	.180
	Negative	-.210

Test Statistic	.210
Asymp. Sig. (2-tailed)	.080 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer diolah (2023)

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1).

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.218	1.800		1.788	.076		
	X1	.218	.096	.155	2.265	.025	.202	4.939
	X2	.771	.100	.588	7.688	.000	.162	6.171
	X3	.417	.059	.495	7.055	.000	.192	5.200

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2023)

Analisis Regresi Linier Berganda ini digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3.218	1.800
	X1	.218	.096
	X2	.771	.100
	X3	.417	.059

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2023)

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.839	.836	2.059

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah (2023)



Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 8
Hasil Signifikansi Nilai t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.218	1.800		1.788	.076
	X1	.218	.096	.155	2.265	.025
	X2	.771	.100	.588	7.688	.000
	X3	.417	.059	.495	7.055	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2023)

Dapat dilihat nilai t_{hitung} dan derajat signifikansi tiap variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis.

Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat Signifikansi 0,05.

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3753.689	3	1251.230	295.113	.000 ^b
	Residual	720.771	170	4.240		
	Total	4474.460	173			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer diolah (2023)

Nilai F_{hitung} adalah sebesar 295,113 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa yakni F_{hitung} sebesar 295,113 lebih besar dari F_{tabel} 2,67, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independent.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Saran Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150-159.
- Abdul Nasir, Arwan Gunawan. (2019). Implementasi *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Industrial Research workshop and National Seminar*.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19-35.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah